

## BAB 5 PEMBAHASAN

### 5.1 Pembahasan Hasil Regresi

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perbandingan pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi mengingat kedua variabel tersebut sama-sama sebagai komponen penerimaan daerah dan sama-sama mewakili variabel modal fisik dalam model pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga dibahas tentang pengaruh dari jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan menggambarkan kualitas tenaga kerja sehingga akan bisa dibandingkan pengaruh tenaga kerja baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitasnya.

Hasil uji regresi dengan model terbaik didapat dan ringkasan hasil dapat dilihat pada tabel 5.1. Regresi ini menggunakan model *fixed effect* dengan *weighted cross section* dan metode *Pooled Weighted cross*.

Tabel 5.1 Ringkasan Hasil Regresi

Variabel Independen	koefisien	Keterangan
Ln PAD	0,201	Signifikan pada $\alpha = 5 \%$
Ln LABOR	0,298	Signifikan pada $\alpha = 5 \%$
Ln SMA	0,216	Signifikan pada $\alpha = 5 \%$
Variabel dependen	Ln PDRB perkapita	
R squared	0,991688	
Adjusted R square	0,985822	
N	175, dengan cross section: 35 dan time series : 5	
F statistik	169,0296	

Dari tabel tersebut dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut

$$\text{Ln PDRB/cap} = \alpha_0 + 0,201 \text{ Ln PAD} + \alpha_2 \text{ Ln DAU} + 0,298 \text{ Ln Labor} + 0,216 \text{ Ln SMA}$$

Pada persamaan tersebut, konstanta dan koefisien Ln DAU tidak tertulis karena untuk variabel DAU koefisiennya akan dilihat per daerah. Jadi untuk mengetahui persamaan daerah tertentu harus dilihat nilai konstanta tiap daerah yang ditunjukkan pada tabel 5.2 dan koefisien DAU masing-masing daerah pada tabel 5.3. Misalnya untuk melihat persamaan regresi di kabupaten Kudus, maka persamaan regresi menjadi

$$\text{Ln PDRB/cap} = 2,671 + 0,201 \text{ ln PAD} + 0,227 \text{ ln DAU} + 0,298 \text{ ln L} + 0,216 \text{ ln SMA}$$

Tabel 5.2 Nilai Intersep Tiap Kabupaten/kota Propinsi Jawa Tengah

No	Kab/kota	Intersep	No	Kab/kota	Intersep
1	Cilacap	-9.760044	19	Kudus	2.671134
2	Banyumas	-6.865347	20	Jepara	-5.848459
3	Purbalingga	-8.737987	21	Demak	0.178996
4	Banjarnegara	-6.626416	22	Semarang	-2.260795
5	Kebumen	-0.756309	23	Temanggung	-4.494186
6	Purworejo	-5.863300	24	Kendal	3.719106
7	Wonosobo	-6.792110	25	Batang	-4.211556
8	Magelang	-3.066749	26	Pekalongan	-3.444709
9	Boyolali	0.949056	27	Pemalang	-2.989861
10	Klaten	-4.346907	28	Tegal	-14.55080
11	Sukoharjo	-2.979707	29	Brebes	-4.372017
12	Wonogiri	-7.451122	30	Kota Magelang	4.187729
13	Karanganyar	0.543228	31	Kota Surakarta	-2.428928
14	Sragen	6.534263	32	Kota Salatiga	0.732102
15	Grobogan	-3.986800	33	Kota Semarang	-1.891023
16	Blora	-2.502149	34	Kota Pekalongan	0.147453
17	Rembang	0.224160	35	Kota Tegal	-23.94920
18	Pati	-7.736772			

Dalam tabel 5.1 terlihat bahwa semua variabel PAD dan *Labor* berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB perkapita dimana masing-masing variabel dalam bentuk logaritma natural. Demikian juga untuk variabel DAU semua daerah berpengaruh positif terhadap PDRB perkapita. Dari 35 daerah, 31 diantaranya berpengaruh signifikan. Hanya 4 daerah yang berpengaruh tidak signifikan yaitu Kebumen, Boyolali, Sragen dan Kendal.

Tabel 5.3 Nilai Koefisien Variabel DAU tiap Kabupaten/kota di Jawa Tengah

No	Kab/kota	Intersep	No	Kab/kota	Intersep
1	Cilacap	0.201065	19	Kudus	0.227195
2	Banyumas	0.298202	20	Jepara	0.482256
3	Purbalingga	0.216129	21	Demak	0.249635
4	Banjarnegara	0.649511	22	Semarang	0.361408
5	Kebumen*	0.498197	23	Temanggung	0.438396
6	Purworejo	0.589016	24	Kendal*	0.136869
7	Wonosobo	0.516127	25	Batang	0.435779
8	Magelang	0.272914	26	Pekalongan	0.402783
9	Boyolali*	0.490854	27	Pemalang	0.362973
10	Klaten	0.516332	28	Tegal	0.784415
11	Sukoharjo	0.365843	29	Brebes	0.417022
12	Wonogiri	0.227092	30	Kota Magelang	0.156788
13	Karanganyar	0.423938	31	Kota Surakarta	0.384388
14	Sragen*	0.388426	32	Kota Salatiga	0.272656
15	Grobogan	0.532278	33	Kota Semarang	0.356328
16	Blora	0.257370	34	Kota Pekalongan	0.306604
17	Rembang	0.014401	35	Kota Tegal	1.212929
18	Pati	0.390253	Rata-rata :		0,395325

Keterangan : \*) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

*Good of fitness* (kesesuaian model) dapat dilihat pada nilai *adjusted R square*-nya. Nilai *adjusted R square* sangat tinggi yaitu 99 persen. Hal ini berarti model dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 99 persen dan hanya 1 persen yang tidak bisa dijelaskan oleh model. Dilihat dari uji F stat ternyata signifikan. Hal ini berarti variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Deteksi multikolinearitas dapat dilihat dengan nilai *R square* yang tinggi dan pengaruh dari sebagian besar variabel independen yang tidak signifikan. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai *R square* memang sangat tinggi tetapi variabel independen berpengaruh positif signifikan dan hanya variabel DAU yang berpengaruh tidak signifikan untuk daerah tertentu. Hal ini

menunjukkan bahwa model ini sudah terbebas dari multikolinearitas. Untuk uji heteroskedastisitas dapat diatasi dengan menggunakan metode *weighted cross section*.

Dalam model *fixed effect*, koefisien variabel independen tiap objek dalam hal ini kabupaten/kota adalah sama, namun intersep tiap daerah akan berbeda dan besarnya tetap antar waktu. Intersep adalah nilai variabel dependen seandainya variabel independen dianggap bernilai nol. Dalam model di penelitian ini, intersep bisa diartikan sebagai *total factor productivity* (TFP). TFP mencakup faktor-faktor yang mengubah hubungan input dan output dan pada umumnya dikaitkan dengan kemajuan teknologi. (Mankiw:2006).

## 5.2 Pembahasan Variabel PAD dan DAU

Variabel PAD menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dari daerah tersebut. Namun demikian pemungutan PAD tidak hanya sekedar mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana pemungutan PAD tersebut tidak membebani masyarakat dan bagaimana penggunaan dana PAD oleh pemerintah daerah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat termasuk dalam peningkatan kesejahteraan yang diukur melalui pertumbuhan ekonominya.

Menurut hasil regresi, koefisien PAD adalah 0,20. Artinya tiap kenaikan porsi PAD terhadap PDRB sebesar 1 persen akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0,20 persen atau dengan kata lain elastisitas dari PAD sebesar 0,20. Pengaruh dari PAD signifikan dengan tingkat keyakinan 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu Pujiati (2008), Pusporini (2006) dan Kharisma (2006).

Komponen utama PAD adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah yang tidak memberatkan perekonomian dan dikembalikan untuk pelayanan publik dan pemungutan retribusi daerah yang bisa meningkatkan pelayanan publik bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Pada daerah perkotaan atau daerah yang sudah maju, basis pajak daerah akan lebih besar karena adanya nilai tambah

produksi yang lebih tinggi. Basis pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak. Pajak yang dipungut dapat dibelanjakan oleh daerah untuk kepentingan publik yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat pada nilai PAD lebih tinggi terdapat di daerah perkotaan dan daerah perkotaan juga memiliki nilai PDRB perkapita yang relatif lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan PAD yang disertai dengan pemungutan PAD yang tidak bersifat membebani dan penggunaannya yang kembali ke masyarakat akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Variabel DAU adalah dana perimbangan yang bersifat *block grant* dan wewenang penggunaannya diserahkan kepada daerah. DAU bertujuan mengurangi ketimpangan antar daerah dan agar daerah mampu melaksanakan tugas pelayanan minimal dalam rangka desentralisasi. Tetapi di sisi lain, DAU adalah sebagai instrumen stimulasi perekonomian daerah. Dalam hal ini pengelolaan dan pembelanjaan DAU oleh pemerintah daerah akan menentukan efektivitas dana DAU untuk mendukung perekonomian daerah.

Menurut hasil regresi, variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar daerah di Jawa Tengah. Dengan rata-rata koefisien DAU adalah 0,38. Dilihat dari klasifikasi kabupaten dan kota, daerah kota memiliki pengaruh DAU yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk daerah kabupaten hanya ada 4 daerah yang DAU-nya berpengaruh tidak signifikan yaitu Kebumen, Kendal, Sragen dan Boyolali. Data ini menggambarkan bahwa pengaruh dana DAU di sebagian besar daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian daerah kota dan daerah kabupaten tidak sepenuhnya bisa dijadikan acuan dalam menentukan signifikan tidaknya peran DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula jika dilihat dari klasifikasi sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Dari 4 daerah yang tidak signifikan, 3 daerah adalah dari sektor pertanian yaitu Kebumen, Boyolali dan Sragen. Sedangkan 1 daerah lain adalah Kendal yang dominan dengan sektor industri. Dengan demikian dominasi sektor tidak bisa dijadikan patokan terhadap pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tabel 5.4 digambarkan perbandingan antara porsi DAU terhadap total penerimaan daerah dengan koefisien variabel DAU dari hasil regresi yang menggambarkan elastisitas DAU terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.4 Perbandingan Persentase DAU dengan Koefisien DAU

No	Kab/kota	% DAU	Koef. DAU	No	Kab/kota	% DAU	Koef. DAU
1	Cilacap	66,44%	0.201065	19	Kudus	63,59%	0.227195
2	Banyumas	77,80%	0.298202	20	Jepara	67,00%	0.482256
3	Purbalingga	67,04%	0.216129	21	Demak	70,80%	0.249635
4	Banjarnegara	61,96%	0.649511	22	Semarang	65,65%	0.361408
5	Kebumen	78,01%	0.498197	23	Temanggung	73,04%	0.438396
6	Purworejo	74,18%	0.589016	24	Kendal*	68,42%	0.136869
7	Wonosobo	75,67%	0.516127	25	Batang	72,26%	0.435779
8	Magelang	70,35%	0.272914	26	Pekalongan	69,13%	0.402783
9	Boyolali*	74,44%	0.490854	27	Pemalang	76,34%	0.362973
10	Klaten	76,21%	0.516332	28	Tegal	75,43%	0.784415
11	Sukoharjo	72,55%	0.365843	29	Brebes	77,48%	0.417022
12	Wonogiri	71,18%	0.227092	30	Kota Magelang	71,07%	0.156788
13	Karanganyar	65,62%	0.423938	31	Kota Surakarta	56,03%	0.384388
14	Sragen*	71,87%	0.388426	32	Kota Salatiga	57,68%	0.272656
15	Grobogan	76,96%	0.532278	33	Kota Semarang	47,46%	0.356328
16	Blora	67,32%	0.257370	34	Kota Pekalongan	74,34%	0.306604
17	Rembang	68,78%	0.014401	35	Kota Tegal	61,07%	1.212929
18	Pati	68,05%	0.390253				

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa tidak ditemukan pola yang pasti mengenai porsi DAU terhadap penerimaan daerah dan elastisitas DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Porsi DAU tertinggi adalah Kebumen, tetapi pengaruh DAU tidak signifikan terhadap pertumbuhan. Demikian pula untuk kabupaten Sragen (71%), Boyolali (74,44%) dan Kendal (68,42%). Porsi DAU sekitar 70 persen ternyata pengaruh DAU tidak signifikan. Sementara itu untuk daerah yang porsi DAU-nya relatif rendah misalnya kota Semarang sebesar 47%, elastisitas DAU sebesar 0,35 dan kota Surakarta (56%) mempunyai elastisitas DAU senilai 0,38. Elastisitas

DAU tertinggi adalah di kota Tegal yaitu sebesar 1,2 dimana porsi DAU kota Tegal sebesar 61 persen. Dengan demikian porsi DAU yang besar belum tentu akan berpengaruh besar pula terhadap elastisitas DAU.

Jika dibandingkan antara PAD dan DAU, maka elastisitas DAU lebih besar. Jika diambil rata-rata elastisitas DAU adalah sebesar 0,39 dan elastisitas PAD hanya sebesar 0,20. Tiap tambahan 1 rupiah dari DAU berdampak lebih besar terhadap peningkatan PDRB perkapita daripada tambahan tiap 1 rupiah dari PAD. Sebenarnya tujuan dari DAU adalah memberikan *basic endowment* yang sama bagi daerah untuk dapat mengoptimalkan potensi daerahnya. Jadi diharapkan peran dari PAD akan lebih besar bagi pembangunan daerah yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian tujuan ini belum terwujud karena peran DAU masih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

### **5.3 Analisa Variabel Kuantitas Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan**

Dalam pembahasan ini akan dianalisa dan dibandingkan pengaruh variabel jumlah tenaga kerja dan kualitas pendidikan yang menggambarkan kualitas tenaga kerja. Hasil regresi menunjukkan koefisien jumlah tenaga kerja sebesar 0,29 yang artinya tiap kenaikan jumlah tenaga kerja 1 persen akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0,29 persen dan signifikan pada tingkat keyakinan 5 persen

Persentase penduduk usia kerja lulusan SMA ke atas terhadap total penduduk usia kerja di suatu daerah menggambarkan kualitas tenaga kerja di tiap-tiap daerah. Kualitas tenaga kerja yang bagus akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai koefisien sebesar 0,22. Artinya tiap kenaikan persentase tingkat pendidikan penduduk usia kerja sebesar 1 persen akan meningkatkan PDRB sebesar 0,22 persen. Variabel tersebut berpengaruh signifikan dengan tingkat keyakinan 5 persen. Hasil ini sama dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Bhinadi (2003) dan Budiono (2001).

Jika dibandingkan antara variabel jumlah tenaga kerja dan kualitas SDM terlihat bahwa kualitas tenaga kerja memiliki nilai elastisitas yang lebih tinggi dimana jumlah tenaga kerja sebesar 0,26 dan kualitas SDM sebesar 0,21 meskipun

dengan selisih yang tipis. Artinya peran dari jumlah tenaga kerja masih besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Masih ada sektor-sektor tertentu yang kemungkinan membutuhkan tenaga kerja yang tidak memiliki level pendidikan yang lebih tinggi misalnya sektor pertanian.

#### 5.4 Analisa Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Pertanian dengan Sektor Non-pertanian

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa daerah sektor pertanian dan sektor non-pertanian memiliki beberapa perbedaan yaitu dari nilai PDRB perkapita, kepadatan penduduk dan persentase penduduk usia kerja yang berlevel pendidikan SMA ke atas. Gambaran tersebut bisa dilihat pada tabel 5.5

Tabel 5.5 Perbandingan Daerah Sektor Pertanian dan Sektor Non-pertanian

Jenis Daerah	Rata-rata PDRB perkapita	Rata-rata Kepadatan Penduduk	Rata-rata persentase tingkat pendidikan
Daerah Sektor Non-pertanian	Rp.5.934.982	3248,4 jiwa/km <sup>2</sup>	25,65 %
Daerah Sektor Pertanian	Rp.2.697.078	875,8 jiwa/km <sup>2</sup>	14,25 %

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 2005-2009 (diolah)

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa rata-rata PDRB perkapita daerah sektor non-pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sektor pertanian. Demikian pula dengan kepadatan penduduk dan persentase penduduk usia kerja lulusan SMA ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang terpusat dan tingkat pendidikan yang tinggi berarti PDRB perkapita dari suatu daerah tinggi pula dan dari data PDRB perkapita yang tinggi terjadi di daerah sektor non-pertanian.

Selanjutnya hasil uji beda rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat pada tabel 5.6. Pada tabel tersebut jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi, daerah sektor pertanian sedikit lebih tinggi yaitu sebesar dibandingkan 4,19 persen sedangkan daerah sektor non-pertanian memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,2 persen. Namun jika diuji secara statistik melalui uji t, ternyata probabilitasnya sebesar 0,084 dan untuk tingkat  $\alpha$  5 persen berarti  $H_0$  tidak ditolak. Dari uji F, probabilitasnya juga sebesar 0,084 dan artinya

H0 tidak ditolak. Melalui uji t dan uji F maka tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Dengan demikian tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antara daerah sektor pertanian dengan daerah sektor non-pertanian.

Tabel 5.6 Ringkasan Hasil Uji Analisis Varian Untuk Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Pertanian dengan Sektor Non-pertanian

Jenis daerah	Jumlah observasi	Rata-rata pertumbuhan ekonomi
Daerah sektor pertanian	95	4,19 persen
Daerah sektor non-pertanian	80	3,20 persen
t-test	Nilai : 1.737897 dengan probabilitas : 0,0840	
F-test	Nilai : 3.020285 dengan probabilitas : 0,0840	

Dalam hal jumlah PDRB perkapita, daerah sektor non-pertanian kelihatan lebih berkembang dibandingkan daerah sektor non-pertanian, tetapi jika dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi maka tidak ada perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika hal ini terjadi secara konstan berarti daerah sektor pertanian tidak dapat mengejar ketertinggalan dari daerah non-pertanian. Secara teori, dalam jangka waktu yang panjang akan terjadi konvergensi, dimana daerah yang miskin dalam hal ini daerah sektor pertanian akan mengalami tingkat pertumbuhan yang pesat dan menyusul daerah yang kaya (daerah sektor non-pertanian) sementara daerah yang kaya pertumbuhan ekonominya cenderung melambat. Berarti ada hal-hal yang perlu dipacu bagi daerah sektor non-pertanian agar tingkat pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dan dalam jangka panjang akan bisa terjadi konvergensi, diantaranya melalui perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas SDM.